

# Laporan Tahunan

**2010**  
1 Januari - 31 Desember 2010

January 1 - December 31, 2010  
**2010**

**Annual Report**



violence regulations, etc.  
 traffic regulations, domestic  
 Taskforce usually handle such as  
 that relevant to cases that the  
 regulations particularly the ones  
 c. Dissemination on several  
 b. Local/District Election  
 of Conduct for the Taskforce

a. Formulating Program and Code  
 several themes:  
 There are several trainings on

Empowerment  
 Policing (COP) Task Force

3. Training for Community Oriented  
 Academy Cadets.  
 research performed by Police  
 and providing assistance for  
 to perform research on their own  
 empower capability of instructors  
 This training was designed to  
 for Police Academy Instructors

2. Training on Research Methodology  
 for Police Academy Instructors  
 This training was designed to  
 empower capability of instructors  
 to perform research on their own  
 and providing assistance for  
 research performed by Police  
 Academy Cadets.

2. Training on Research Methodology

**Strengthen Civic Values through Religious Institutions and the Police in Indonesia**

**Programs**

proficient academic culture.  
 academic activities to build  
 strengthen knowledge and develop  
 Academy on the importance to  
 structural officers in Police  
 understanding for instructors and  
 This workshop is to provide

**1. Workshop on Discourse and Methodology Strengthening**

accomplished this year are:

The detail activities that had been  
 continuation of previous year activities.  
 implemented in year 2010 are  
 In this program, activities that



**Program**

**Rangkaian Program Polmas dan HAM**



Dalam program ini, kegiatan yang  
 dilaksanakan dalam tahun 2010  
 merupakan kelanjutan dari kegiatan  
 pada tahun sebelumnya. Dengan rincian  
 kegiatan sebagai berikut:

**1. Workshop Penguatan Wacana dan Metodologi**

Workshop ini merupakan kegiatan  
 untuk memberikan pemahaman  
 terhadap tenaga pendidik dan  
 pejabat struktural AKPOL tentang  
 pentingnya penguatan wacana  
 pengetahuan dan pengembangan  
 kegiatan akademik untuk  
 membangun kultur akademis yang  
 mumpuni.

**2. Training Metodologi Penelitian untuk Tenaga Pendidik Akpol**

Training dirancang sebagai bagian  
 dari penguatan kemampuan tenaga  
 pendidik Akpol dalam melakukan  
 penelitian dan pembimbingan  
 penelitian bagi taruna akpol.

**3. Training Penguatan Pokja COP**

Beberapa training yang dilakukan  
 untuk Pokja pada tahun 2010  
 adalah:

- a. Penyusunan program dan kode etik pokja
- b. Training tentang PILKADA
- c. Sosialisasi undang-undang khususnya yang relevan dengan penanganan kasus yang sering dilakukan oleh pokja seperti undang-undang lalu lintas, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, dll.
- d. Persoalan di dunia peradilan yang dianggap dapat menghambat akses keadilan

bagi masyarakat banyak

- e. Training analisa sosial berguna untuk meningkatkan kemampuan pemahaman pokja COP

**4. Training Untuk Tenaga Pengasuh Taruna Akademi Kepolisian Semarang**



Untuk membangun kultur pengasuhan Taruna Akpol yang lebih humanis dan menghormati nilai-nilai HAM.

**5. Training Polmas HAM Untuk Anggota Satpol PP**

Satpol PP yang juga bekerja di wilayah keamanan masyarakat perlu untuk mendapatkan materi tentang polmas sehingga dapat mengelola keamanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan instruksi.

**6. Training Polmas HAM Untuk Anggota Polisi dan FKPM Wilayah Polres Sleman**

Perubahan kebijakan dari Skep 737/2005 ke Perkap NO. 8/2009 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perjalanan program Polmas yang dalam kebijakan baru lebih memiliki bobot yang banyak sehingga pilihan untuk mendorong program polmas tersebut mejadi penting.

**7. Riset Alumni Akademi Kepolisian**

Riset alumni ini dimaksudkan untuk menilai sejauhmana pemahaman sekaligus penerapan materi Polmas dan HAM dilakukan oleh para alumni Akpol dalam bertugas di masyarakat.

**8. Kuliah Polmas HAM di Kampus**



Untuk menarik dukungan tentang persoalan HAM dan keamanan di

amongst the community while performing their duties



implement their knowledge on it Rights as well as how far they Community Policing and Human extent the alumni comprehend This research is to assess to what

**7. Research on Police Academy Alumni**

implement turn makes it far more important to toward community policing and in this regulation gives more attention toward this program, from which 8/2009 leads to significant impact Skep 737/2005 to Law Perkap NO.

The change of policy used from Law Sleman District

Police Communication Forum at Officers and members of Public- Community Policing for Police 6. Training on Human Rights and

than instruction-based

with community need basis rather so they are able to manage security knowledge on community policing the community required to have Members who works directly with Local Government Security Forces Members

**5. Training on Human Rights and Government Security Forces**

values same time respecting human rights humanitarian culture and at the This training is to build a more



**4. Training for Police Academy Cadets' Caretakers**

Taskforce's understanding. e. Social analysis to increase the toward justice hamper community access d. Judicial problems that could



8. Community Policing and Human Rights Lecture at University

To draw supports from university students on human rights and security issues, so it is expected that they will have awareness that human rights and security problems became shared responsibility.

9. Seminar and Workshop on Program

Evaluation This activity is to evaluate programs that had been accomplished with the Academy so it is expected to have other new programs in the future.

10. Training on Community Policing

and Human Rights for Police Academy Cadets The cadets to be placed in the field and local areas require knowledge and capability on community

11. Seminar and Regional Meeting at

respecting human rights and social analysis to enable them to resolve problems they about to face humanly and

The theme of this activity is Human Rights Day Reflections: Re-actualization of Human Rights issue to the Public in Indonesia. Invited participants are university students and members while building up more comprehensive network to enable students critical point of view.

kalangan mahasiswa, program ini dilaksanakan dengan harapan akan muncul pemahaman bahwa persoalan HAM dan keamanan merupakan tanggungjawab bersama.



9. Seminar dan Workshop Evaluasi Program Akpol

Untuk tindak lanjut kedepan maka evaluasi terhadap program yang dijalankan bersama Akpol diselenggarakan dalam bentuk seminar dan workshop dengan harapan akan muncul program-program baru

10. Training Polmas dan HAM Untuk Taruna Akademi Kepolisian Semarang

Taruna Akpol yang akan ditempatkan dilapangan dan daerah perlu dibekali kemampuan tentang Polmas dan Ansos sehingga ketika

bekerja dilapangan dapat menyelesaikan persoalannya secara humanis dengan tetap menghormati nilai-nilai HAM

11. Seminar dan Regional Meeting Di Kampus dengan Tema Refleksi Hari HAM: Re Aktualisasi Isu HAM Ke Publik di Indonesia

Acara yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika yang lebih luas dan membangun jaringan yang lebih komprehensif sehingga daya kritis mahasiswa dapat dibangun melalui kegiatan ini.

## Kampanye Peradilan Bersih

### A. Latar Belakang

Sistem peradilan Indonesia selama rezim orde baru tidak bisa disangkal memiliki permasalahan yang sangat mendasar, diantaranya, peradilan yang berada dalam sistem sentralistik dan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan putusan-putusan hukum, dan peradilan yang terkurung dalam ideologi yang sangat anti terhadap hak asasi manusia. Para pencari keadilan selalu dihadapkan dengan fakta-fakta yang mengecewakan dalam putusan-putusan peradilan. Buruknya peradilan yang berlangsung di era orde baru, telah melahirkan kultur dan struktur baru di tubuh peradilan hingga saat ini. Para pihak yang terlibat dalam penyelesaian peradilan mulai



Polisi, Jaksa, Panitera, Hakim, Terdakwa dan Pengacara, semuanya sudah punya pemahaman umum bahwa dalam peradilan sudah biasa ada tawar menawar dan jual beli perkara. Bahkan aktor-aktor luar di sekeliling institusi peradilan seperti tukang parkir dan jurnalis juga terlibat dalam praktek kotor ini. Tukang parkir biasa dipakai sebagai makelar sedangkan jurnalis bertugas dalam pemuatan berita sehingga tidak menyudutkan dakwaan jaksa dan putusan para hakim.

Realitas hukum dan peradilan yang



usually used as a broker while the journalist is usually publishes news

as requested.

The reality of such wrongly law and

justice is become public truth. Till

survey stated that bribery index in

Judicial institution has reached 30%

with the average amount of bribe

money circulation occupies the first

position. Every transaction of

bribes in court is IDR 102.4 million in

average, larger than the average

amount of bribe money in the police

and immigration which ranged

averagely IDR \$ 2.2 million and IDR

2.8 million per bribe transactions.

It is undeniable that Indonesian judicial system under the New Order regime has fundamental problems, among others is centralized judicial system that cause abuse of legal rulings, and anti-human rights judicial ideology. Such poor of judicial practices, has spawned a new culture and structure in the judiciary body up to the present. All parties involved in a judicial settlement - starts from the police, prosecutors, registrars, judge, defendants and lawyers - has common understanding that it is normal to have bargaining to settle a case or trading a certain case. Even actors around the judicial institutions such as street parking and journalists were also involved in this dirty practice. Parkman is

### A. Background

## Clean Judiciary Campaign

to be provocative and draw the Clean Judicial Campaign is designed

B. Description

clean judicial system in the future. partners to cooperate with to build community will become active very important with hope that the campaign to civil society become stagnant problems. Clean judicial it does not become an acute and improve dirty judicial practices, so agencies which responsible to the government, particularly conditions should be restored by Such disturbing situations and seek justice and truth.

institution as a place to distorting the judicial and law; second, the dignity of politics to maintain and uphold loss of its responsibility distorting the state because the shown from, among others, of dirty judicial are restless, it is Community, especially the victims



Case trading not only happen in one court level, but also in all levels: from District Court, High Court, until the Supreme Court; starts

from criminal cases, civil cases to commercial cases. The bigger the case the greater the cost. The higher the court, the more money to bribe. This condition indicates that the reform that has passed a decade, particularly judicial reform is still least in progress. Judicial mafia practices is systematically existed with the various networks which seemingly untouchables. Even nowadays blatantly seen how this mafia is using all means to destroy the judicial reform carried by civil society.

tidak benar itu seakan telah menjadi kebenaran publik. Dalam survey TII dinyatakan bahwa indeks suap di lembaga pengadilan telah



mencapai 30% dengan kriteria jumlah rata-rata uang suap yang beredar menempati posisi pertama. Setiap transaksi suap di pengadilan rata-rata sebesar Rp 102,4 juta, lebih besar dari jumlah rata-rata uang suap yang beredar di kepolisian dan imigrasi yang berkisar rata-rata Rp 2,2 juta dan Rp 2,8 juta pertransaksi suap. Jual beli perkara tidak hanya terjadi di satu tingkatan pengadilan saja tetapi berlangsung di semua tingkatan: mulai PN, PT sampai MA; mulai perkara pidana, perdata ataupun perkara-perkara niaga.

Semakin besar perkaranya semakin besar biayanya. Semakin tinggi tingkat pengadilannya semakin tinggi uang suapnya. Kondisi ini

menandakan bahwa reformasi yang telah lewat satu dasawarsa, khususnya reformasi peradilan masih belum bergerak maksimal. Praktek mafia peradilan

masih berlangsung sistematis dengan berbagai jejaringnya yang seakan tidak tersentuh. Bahkan akhir-akhir ini terlihat bagaimana kekuatan mafia ini menggunakan segala cara untuk menghancurkan reformasi peradilan yang diusung oleh masyarakat sipil.

Masyarakat terutama para korban peradilan kotor itu terlihat sangat resah, salah satu wujudnya antara lain, tidak percaya pada negara karena kehilangan tanggungjawabnya untuk menjaga dan menegakkan keluhuran politik dan hukum. Kedua, tidak percaya

pada lembaga peradilan sebagai tempat penyelesaian keadilan dan kebenaran. Situasi dan kondisi yang meresahkan ini harus dipulihkan oleh pemerintah, khususnya lembaga yang mengemban tugas membenahi peradilan yang kotor, sehingga tidak menjadi problem yang akut dan jumud. Kampanye peradilan bersih untuk masyarakat sipil menjadi sangat penting dengan harapan masyarakat akan menjadi pihak aktif yang bisa diajak kerjasama untuk membangun peradilan bersih kedepan.

## B. Deskripsi

Kampanye Peradilan Bersih didesain bersifat provokasi dan mengajak peran serta masyarakat sipil untuk terlibat dalam menyuarkan peradilan bersih sekaligus mengajak mereka untuk memerangi berbagai praktek mafia peradilan yang masih berlangsung sampai saat ini. Kegiatan Kampanye Peradilan Bersih meliputi, yaitu;

### 1. Talk Show

Kegiatan *talkshow* radio kita tempatkan di Unisi, satu stasiun radio yang ada di daerah Demangan, berdekatan dan dikelilingi oleh banyak kampus di Yogyakarta, mulai UIN Sunan Kalijaga, UNY, Atmajaya, Ull, dan lainnya. Tempat radio ini begitu strategis di tengah keramaian kota. Disamping itu, radio Unisi diminati oleh banyak pemirsa utamanya masyarakat umum dan mahasiswa. *Talkshow* membicarakan soal sistemiknya mafia peradilan di Indonesia, dan mendiskusikan bagaimana peran-peran Komisi Yudisial dan masyarakat pada umumnya.

### 2. Iklan Layanan Masyarakat

Iklan layanan masyarakat berupa video yang ada gambar dan suaranya yang berisi ajakan dan kampanye publik untuk

Public service ads --in video-- invites public to support clean judiciary campaign in Indonesia. This video was played before the movie in theaters Twenty One (XXI) aired. Twenty One (XXI) theatres were chosen because it has many viewers, especially among the youth, students and professionals.

### 3. Posters and Banners

Posters and banners are targeting the general reader, disregarding geographical background (rural-urban) or social class backgrounds (lower, middle or higher social class). Its contains a written solicitation campaign and morals to reject any form of judicial mafia and calls for people to involve in the program of the judicial Commission (KY) in upholding the honor and nobleness of

participation of civil society to engage in voicing clean judiciary as well invite them to combat a variety of judicial mafia practices that still lasts to this day. Clean Judicial Campaign activities covers, i.e.:

#### 1. Talk Show

For this activity we cooperated with 'Unisi', located in Demangan area, adjacent to and surrounded by many campuses in Yogyakarta, such as UIN Sunan Kalijaga, UNY, Atmajaya, Ull, and others. The place of the radio station is strategic, in the middle of the hustle of the city. Moreover, most of Unisi listeners are public and university students. The talk show discussed about how systemic the mafia is in Indonesia, and discuss how the roles of the judicial Commission and the community at large.

#### 2. Public Service Ads



were cooperated with 3 (three) high schools in 3 (three) areas, which include SMKN Sleman, SMKN 1 Yogyakarta and SMA N 1 Bantul. The participants are the students and teachers, since their involvement is essential in order to realize clean judiciary in the future.

6. **One Day Seminar**  
The seminar was held in one session, inviting various groups include, NGOs, community organizations, mosques, activists, community leaders and the student movement in Yogyakarta. The invited participants are very important because their intensity of involvement in public affairs both in institutional and social. The theme is about human rights, judicial conditions in Indonesia and the existence of the Judicial Commission (KY).  
7. **Distributing Questionnaires**  
Clean Judicial Campaign

judicial institutions.  
4. **Community Dialogue**  
This activity is a direct and open dialogue between communities, which was attended by all levels of society that reflect diversity. In this event PUSHAM UJI were cooperate with certain organizations that exist in communities in 3 (three) regions. The dialogue was discussing about the importance of clean, dignity and free from judicial mafia, as well as introducing the existence of the Judicial Commission with all its authority. The dialogue was held in three regions, covering Umbulharjo in the city of Yogyakarta, Depok in Sleman district, and Janten village in the district of Kulonprogo.  
5. **Series of Lectures for High School Students**  
In this activity, PUSHAM UJI

mewujudkan peradilan bersih di Indonesia. Video ini diputar sebelum tayangan film bioskop *Twenty One (XXI)* ditayangkan. Lokasi *Twenty One (XXI)* kami pilih karena penontonnya yang sangat ramai terutama dari kalangan kaum remaja, mahasiswa dan kaum profesional.

3. **Pembuatan Poster Dan Spanduk**  
Poster dan spanduk menyasar pembaca secara umum, dengan tidak memperhatikan latar belakang geografis (desa-kota) atau latar belakang kelas sosial (sosial bawah, menengah atau atas). Pesan yang dituliskan berisi kampanye dan ajakan moral untuk menolak segala bentuk mafia peradilan dan mengajak masyarakat terlibat dalam program Komisi Yudisial (KY) dalam menegakkan kehormatan dan menjaga

keluhuran lembaga peradilan.

4. **Temu Wicara Dengan Masyarakat**  
Kegiatan ini merupakan dialog langsung dan terbuka antar masyarakat secara umum yang dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat yang mencerminkan keragaman. Untuk acara ini Pusham UJI bekerjasama dengan organisasi tertentu yang ada di masyarakat di 3 (tiga) wilayah. Temu wicara mendialogkan soal pentingnya peradilan bersih, bermartabat dan bebas dari mafia peradilan. Sekaligus memperkenalkan keberadaan lembaga Komisi Yudisial (KY) dengan segala wewenangnya. Temu wicara ini dilaksanakan di tiga wilayah, meliputi Umbulharjo di kota Yogyakarta, Depok di Kabupaten Sleman, dan Desa Janten di Kabupaten Kulonprogo.

**5. Ceramah Serial Dengan Murid-Murid SMA**

Dalam kegiatan ini PUSHAM UII bekerjasama dengan 3 (tiga) sekolah tingkat SMA di 3 (tiga) wilayah, yang meliputi sekolah SMKN Kabupaten Sleman, sekolah SMK 1 Kota Yogyakarta dan sekolah SMA N 1 Kabupaten Bantul. Ceramah serial ini pesertanya ialah para siswa dan para guru, keterlibatan mereka sangatlah penting demi terwujudnya peradilan bersih di masa depan.

**6. Seminar Sehari**

Seminar sehari dilaksanakan satu sesi. Seminar ini mengundang berbagai kalangan meliputi, LSM, ormas, aktifis masjid, tokoh-tokoh masyarakat dan gerakan mahasiswa di Yogyakarta. Undangan sangat penting karena intensitas keterlibatan mereka dalam persoalan-

persoalan publik baik secara kelembagaan maupun sosial kemasyarakatan. Tema yang diangkat ialah seputar hak asasi manusia, kondisi peradilan di Indonesia dan eksistensi lembaga Komisi Yudisial (KY).

**7. Penyebaran Kuisisioner**

Kuisisioner Kampanye Peradilan Bersih dibagikan kepada para pesertaa temu wicara masyarakat di tiga wilayah. Kuisisioner dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang urgensi dan rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan kampanye peradilan bersih yang sedang dilaksanakan.

**C. Hasil**

**1. Talkshow Di Radio Unisi**

*Talkshow* di radio Unisi kita laksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan. Setiap *talkshow* dilaksanakan sekitar

c. Monday, March 15, 2010  
 Speaker : Eko Riyadi, S.H.  
 Topic : How Systemic the Judiciary Matia in Indonesia is



Time : 20.00-21.00 WIB  
 Court

b. Monday, March 8, 2010  
 Speaker : M. Syafrine, S.H.  
 Topic : Community Role in Keeping the Nobility of the

Time : 20.00-21.00 WIB  
 Judiciary  
 Promoting Clean Commission in

a. Monday, March 1, 2010  
 Speaker : Imran, S.H., M.H.  
 Topic : The authority of the judicial

Indonesia. Its activities include: encouraging clean judiciary in that is the urgency of main context of the campaign different but still within the Topics for each show are hour with one spoke person. duration of each show is one conducted three times. The talk show in Unisi was

**1. Talkshow**

**C. Results**

Questionnaires distributed to participants of community dialogue in three regions. The distribution of questionnaire was conducted to get description on the urgency and recommendations of future activities of the clean judicial campaign activities project.